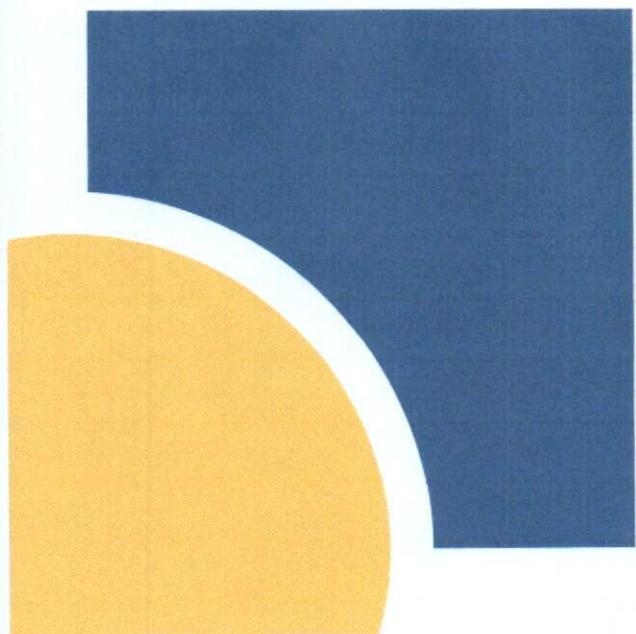


LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023



Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI yang tertuang melalui Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Laporan Pelayanan Informasi Pada PPID Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik RRI,



Yonas Markus Tunuleruw

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di LPP RRI	1
B. Bidang Pelayanan Informasi	3
C. Bidang Pengelolaan Informasi	5
D. Rincian Pelayanan Permohonan	20

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di LPP RRI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

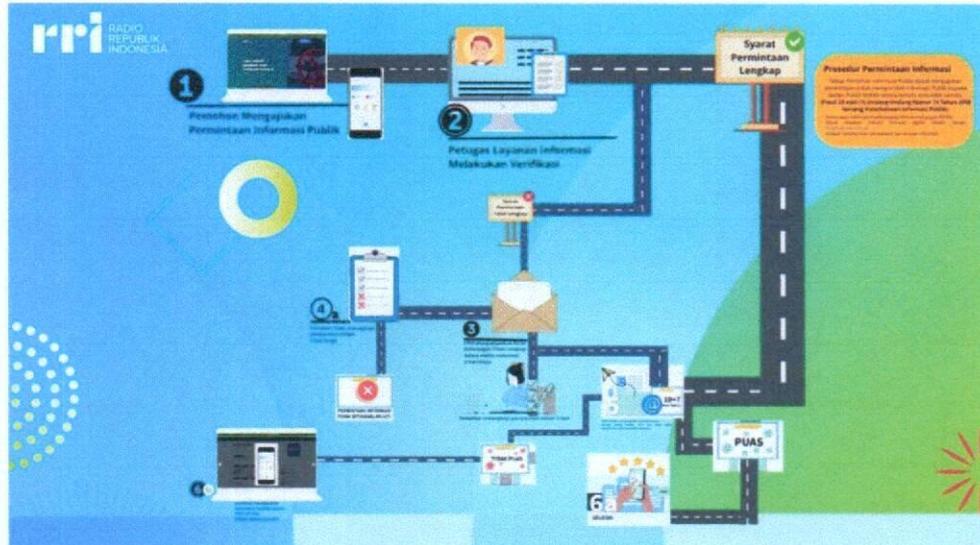
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No.14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

Gambar Alur Permohonan Informasi Publik



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik
2. Petugas layanan informasi melakukan verifikasi
3. PPID memberikan jawaban sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pemohon informasi menerima jawaban atas permohonan informasi, proses berakhir apabila pemohon puas atas jawaban dari PPID
5. Pemohon yang tidak puas atas jawaban PPID dapat menyampaikan keberatan
6. PPID memberikan jawaban atas keberatan pemohon informasi
7. Proses berakhir apabila permohonan puas atas jawaban keberatan
8. Pemohon informasi yang tidak puas atas jawab keberatan PPID dapat mengajukan sengketa melalui Komisi Informasi

C. Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi, di bulan April 2016 RRI telah membuat website ppid.rrr.co.id dan di tahun 2023 menjadi ppid.rrr.go.id sebagai upaya mempermudah Masyarakat dalam mengakses informasi tentang RRI.

LPP RRI menggelar Bimbingan Teknis PPID yang diikuti oleh Kepala RRI seluruh Indonesia pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2016 di Bogor.



Bidang Pengelolaan Informasi : Sejak bulan Mei 2016, RRI menggelar Bimbingan Teknis kepada pengelola/operator PPID, diantaranya ; tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2016 di Yogyakarta (se Jawa dan Bali), tanggal 26/28 Mei 2016 di Makassar (Wilayah Timur) dan tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2016 (Wilayah Barat).



Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kembali menggelar Rapat Kerja Optimalisasi PPID di Lingkungan LPP RRI pada tanggal 18 November 2016 di Kendari.



Bimbingan Teknis Penguatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID LPP RRI (Sakter se-Sumatera) pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2019 di Padang, Sumatera Barat. Bimtek ini menghadirkan narasumber diantaranya;

- Cecep Suryadi (Komisioner Komisi Informasi Pusat)
- Dedi Suparman (Kepala SPI LPP RRI)
- Hugo Lidero (Web Developer PPID LPP RRI)
- Andi Permadi Kencono Wulan (Kabid TMB Puspem)

Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2020 bidang Pengelola PPID LPP RRI kembali melakukan Bimbingan teknis terkait pembaruan Web, Pelayanan dan Pengolahan Data yang berlangsung di Jambi. Bimtek ini dihadiri oleh seluruh operator/petugas penginput informasi publik dan Kepala Bidang LPU se-Indonesia. Bimtek ini menghadirkan narasumber diantaranya ;

- Cecep Suryadi (Komisioner Komisi Informasi Pusat)
- Aditya Nuriya S (Staf Ahli Komisi Informais Pusat)
- dan Hugo Lidero (Web Developer PPID LPP RRI)



Di tahun 2020 Bidang Pengelola Informasi Publik PPID RRI melakukan pengembangan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik khusus Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra melalui penyediaan informasi publik dengan huruf braile dan audio. Desember 2020 PPID LPP RRI seluruh Indonesia telah tersedia informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik netra dalam bentuk Buku Braile dan Audio.

Foto Layanan Informasi Publik Khusus Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di PPID Pelaksana RRI Bogor



Foto Layanan Informasi Publik Khusus Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di PPID Pelaksana RRI Bandar Lampung



Adapun kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh PPID LPP RRI di Tahun 2021 sebagai berikut :

Dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI menggelar workshop Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2021 di Takengon, Aceh Tengah. Direkutr Layanan dan Pengembangan Usaha, Anhar Achmad menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian daripada peringatan International Right to Know Day di LPP RRI. Anhar Achmad menambahkan kegiatan workshop ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi PPID Pelaksana LPP RRI di Provinsi Banda Aceh dan Sumatera Utara. Workshop Keterbukaan Informasi Publik kali ini menghadirkan narasumber diantaranya ; Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Khairuddin Yus dan Rektor UIN Gajah Putih Takengon, Zulkarnain.



PPID LPP RRI Kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik yang berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2021 di Bogor Jawa Barat. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Anhar Achmad selaku PPID Utama RRI mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka menyamakan persepsi dan optimalisasi

pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hadir sebagai Narasumber dalam Bimbingan Teknis PPID RRI diantaranya : Arif Adi Kuswardono – Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Wafa Patria Umma – Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, M.Syahyan – Ketua Bidang Regulasi, dan Kebijakan Publik.



Lembaga Penyiaran Publik RRI Kembali melakukan koordinasi dalam rangka memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik. Dalam rapat yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2021 di Sentul City, Jawa Barat. PPID Utama LPP RRI Anhar Achmad mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta komitmen dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Hadir dalam Rapat Koordinasi diantaranya, Anggota Dewas RRI, Frederik Ndolu, Direktur Program dan Produksi, Soleman Yusuf, Kepala RRI Jakarta Enderiman Butar-butar, Kepala Pusat Pemberitaan, Widhie Kurniawan, Kapuslitbangdiklat Adi Pramono, Kepala SPI Dedi Suparman, Kepala Bidang Komunikasi Publik Siti Saraswulan, Kepala Bidang Layanan Publik Syarifuddin serta para JFT di lingkungan Direktorat LPU.



Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha RRI, Anhar Achmad membuka Bimbingan Teknis “Aplikasi Layanan Informasi Publik Berbasis Android Serta Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Khusus Penyandang Disabilitas Sensorik Netra” yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Maret 2021 di Hotel Kuta Paradiso Denpasar Bali. Selain Kepala RRI Denpasar Nawik Nawihu, Bimtek PPID LPP RRI ini juga menghadirkan beberapa narasumber yakni; Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede, Kepala Balai Literasi Braile Indonesia, Isep Sepriyan dan Web Developer PPID LPP RRI Hugo Lidero.



Tahun 2022 PPID Utama LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI membuka secara resmi pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta

Sosialisasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara yang berlangsung pada 30 Mei-1 Juni 2022 di Manado, Sulawesi Utara.

Tahun 2022 ini PPID LPP RRI kembali melakukan inovasi melalui pelayanan informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara berkolaborasi dengan Badan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Melati" Kemensos RI untuk melayani Masyarakat berkebutuhan khusus dalam rangka memenuhi amanat konstitusi.



Rapat Koordinasi & Sosialisasi PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Serta Penyediaan & Pelayanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara PPID LPP RRI di Bogor tanggal 29-31 Agustus 2022. Rapat Koordinasi PPID LPP RRI ini diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana RRI di Seluruh Indonesia, dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya :

Komisioner Informasi Pusat Republik Indonesia Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Ibu Hj. Samrotunnajah Ismail, SE., M. Si. Dan Kepala Sentra Mulya Jaya, Andrianus Alla, S.ST.



PPID LPP RRI secara aktif mengikuti kegiatan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga, diantaranya Menghadiri Penyusunan Rancangan Peraturan BPOM tentang Standar Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan POM RI pada tanggal 3 Agustus 2022 di Bekasi, Jawa Barat.

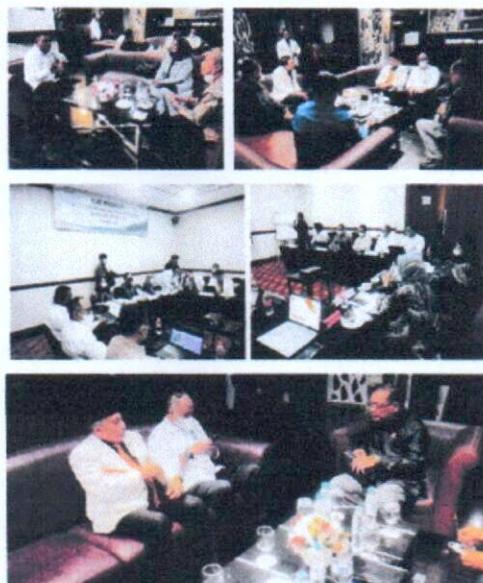


PPID Utama LPP RRI, Yonas Markus Tuhleruw menerima kunjungan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ibu Hadi Wahyuningrum, SH., MM dalam rangka konsultasi terkait studi banding website PPID LPP RRI

Senin, 11 Juli 2022 di Ruang Rapat Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha di Jakarta



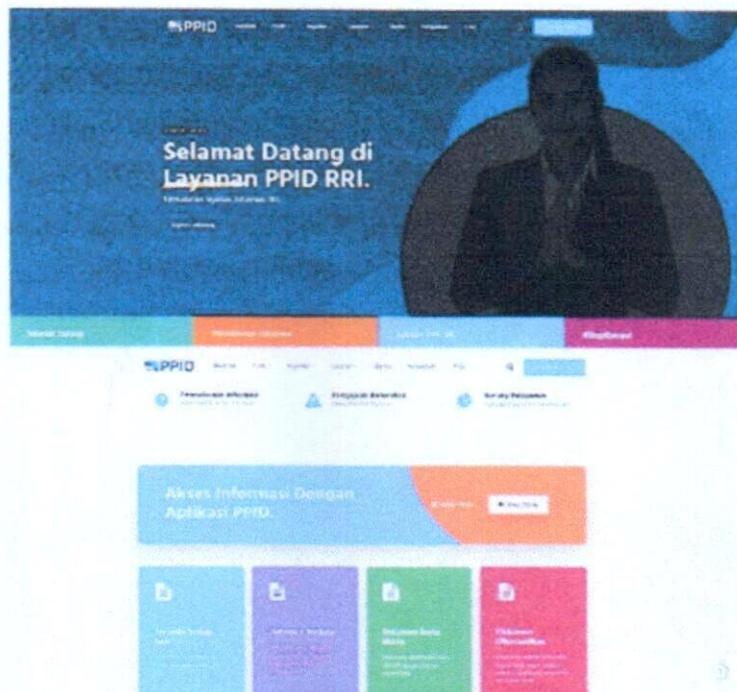
Atasan PPID Utama (Direktur Utama RRI) I. Hendrasmo dan PPID Utama LPP RRI Yonas Markus Tuhuleruw menghadiri acara Uji Publik Keterbukaan Informasi Selasa, 1 November 2022 di Redtop Hotel Jakarta yang merupakan tahap akhir pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIP tahun 2022.



Pada Tahun 2022 PPID LPP RRI melakukan pengembangan penyediaan dan pelayanan informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, melalui penyediaan informasi publik dengan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).



Tahun 2022 PPID LPP RRI juga melakukan redesign homepage website ppid.rii.co.id dengan menambahkan fitur dan tampilan warna lebih cerah.



Tahun 2023 PPID Utama LPP RRI menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID LPP RRI se-Indonesia pada tanggal Senin 8 Mei 2023 secara virtual di Jakarta yang menginstruksikan kepada seluruh PPID Pelaksana RRI untuk terus meningkatkan kinerja, melakukan kolaborasi dengan stakholder serta menciptakan terobosan baru dalam rangka ikut serta mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, efektif, dan efisien sehingga dapat kembali meraih kategori sebagai badan publik yang informatif di Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut turut hadir Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Aditya Nuriya Sholikhah, SH., MH menjelaskan beberapa hal dalam meningkatkan kapasitas PPID LPP RRI. Pada kesempatan yang sama Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi Hugo Lidero memaparkan bahwa dasar pengembangan Aplikasi PPID (web, android dan ios) sebagai berikut : Peningkatan pelayanan permohonan informasi, kemudahan manajemen data dokumen informasi, Adaptabilitas perkembangan teknologi, Fleksibilitas layanan informasi.



PPID LPP RRI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2023 yang

merupakan agenda rutin setiap tahun, sama halnya seperti penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan layanan informasi publik. PPID RRI akan berupaya mempertahankan kembali capaian kinerjanya yakni sebagai Badan Publik Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.



Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyelenggarakan acara launching Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam huruf Braille dan audio yang berlangsung Kamis, 14 Setember 2023 di Hotel Lumire Jakarta. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid bersama Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro dan jajaran komisioner, secara simbolis menandai peluncuran Buku IKIP 2023 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam huruf braille dan audio.

Pada kesempatan itu, PPID Utama LPP Radio Republik Indonesia, Yonas Markus Tuhuleruw menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik yang ramah disabilitas dalam pelayanan informasi publik.



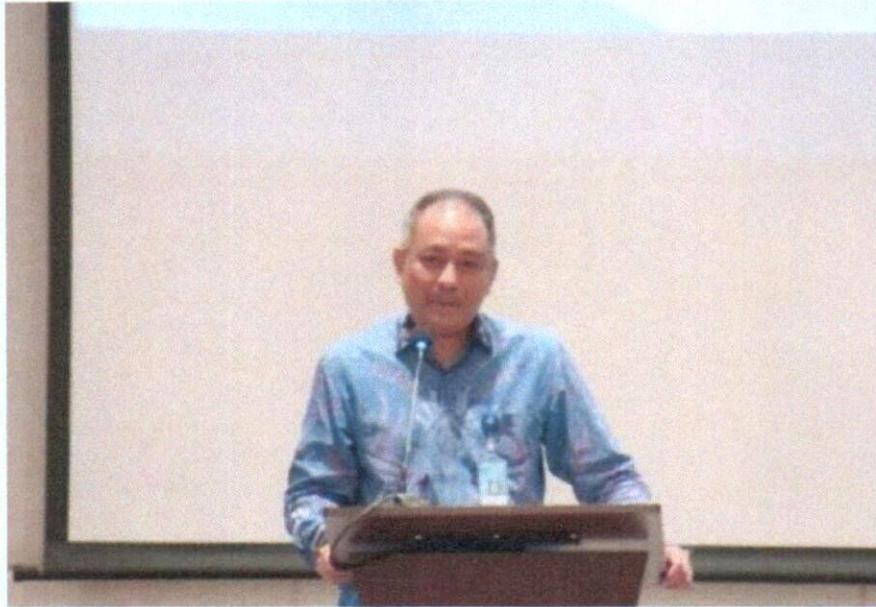
Pada Tanggal 25 September 2023 PPID LPP RRI mengikuti kegiatan Workshop dengar pendapat kendala dan permasalahan dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.



Pada tanggal 29-30 September 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI menggelar Rapat Uji Konsekuensi dalam memutuskan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Radio Republik Indonesia Tahun 2023.



LPP RRI berkomitmen untuk mendorong implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dibuktikan dengan penandatanganan Kerjasama (MoU) antara LPP RRI dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada saat Rapat Koordinasi Teknis Ke-12 Komisi Informasi Se-Indonesia Tahun 2023 dengan tema "Harmonisasi Program dan Kegiatan Komisi Informasi Se-Indonesia Tahun 2024" yang berlangsung pada 16-18 Oktober 2023 di Tangerang.



PPID LPP RRI mengikuti Presentasi Uji Publik yang merupakan tahapan dari evaluasi dan monitoring Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban atas amanat negara dan pelayanan kepada Publik. Sejak Tahun 2022, website PPID LPP RRI telah memuat informasi tentang barang dan jasa di lingkungan LPP RRI, meliputi dokumen rencana umum pengadaan, kerangka acuan kerja, harga serta riwayat hps, spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan dokumen lainnya.



D. Rincian Pelayanan Permohonan

Selama tahun 2023, PPID Lembaga Penyiaran Publik RRI menerima : 1237 pemohon informasi 205 permintaan yang disampaikan melalui Front Desk Layanan Informasi Publik, 1032 pemohon melalui aplikasi layanan online Website PPID RRI.

1. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Status			Alasan Penolakan	
				Penuhi	Tolak	Proses	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
1	Januari	92		V				
2	Februari	68		V				
3	Maret	119		V				
4	April	85		V				
5	Mei	115		V				
6	Juni	122		V				
7	Juli	108		V				
8	Agustus	98		V				
9	September	112		V				
10	Oktober	129		V				
11	November	102		V				
12	Desember	87		V				
	Total	1237						

2. Jenis Saluran Permohonan Informasi Publik

No	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Email/Download	Total
1	Januari	-	1	91	92
2	Februari	-	5	63	68
3	Maret	-	4	115	119
4	April	-	0	85	85
5	Mei	-	5	110	115
6	Juni	-	3	119	122
7	Juli	-	3	105	108
8	Agustus	-	6	92	98
9	September	-	2	110	112
10	Oktober	-	5	124	129
11	November	-	3	99	102
12	Desember	-	2	85	87
	Total	-	39	1198	1237

3. Klasifikasi Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Instansi	Masyarakat Umum dan Mahasiswa/ Pelajar	Lembaga Swadaya Masyarakat	Total
1	Januari	2	90	-	92
2	Februari	3	65	-	68
3	Maret	3	116	-	119
4	April	2	83	-	85
5	Mei	1	114	-	115
6	Juni	2	120	-	122
7	Juli	2	106	-	108
8	Agustus	1	97	-	98
9	September	-	112	-	112
10	Oktober	-	129	-	129
11	November	-	102	-	102
12	Desember	-	87	-	87
	Total	16	1222		1237

Penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2023, tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID LPP RRI memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

4. Capaian Kinerja PPID LPP RRI

PPID LPP RRI kembali meraih penghargaan dengan predikat sebagai Badan Publik kualifikasi "**INFORMATIF**" dengan nilai 97,32 sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada Selasa 19 Desember 2023 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta.



LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	98,14
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	98,02
3	Otoritas Jasa Keuangan	97,76
4	Radio Republik Indonesia	97,32

